

ABSTRACT

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI

Berniati /NPM: 0441031179

/085368158585/berniati99@ymail.com

Pembimbing I: Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.

Pembimbing II: Basuki Wibowo, S.E., Akt.

Good Corporate Governance is basically a system (input, process, output) and a set of rules governing the relationship between the various parties (stakeholders), especially in the narrow sense of the relationship between shareholders, board of commissioners, and the board of directors for the achievement of corporate objectives.

The selection of the sample in this study using a purposive sampling method. The importance of the 46 companies included in the sample for the implementation of corporate governance ranking or survey on the implementation of the corporate governance of public companies listed on the Stock Exchange conducted by the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

These results indicate that corporate governance, ownership structure, independent directors, audit committee and firm size significantly affect disclosure.

Keywords: corporate governance, ownership structure, independent directors, audit committees and company size

PENDAHULUAN

Tata kelola suatu perusahaan atau yang dikenal dengan istilah *corporate governance* merupakan suatu gambaran yang menjelaskan adanya hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan tersebut yang saling berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*, yang berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.

Pada umumnya suatu perusahaan dalam suatu periode diwajibkan melaporkan semua kegiatan keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan kepada para *stakeholders*. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk

memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode akuntansi yang telah berlalu, serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen.

Ciri utama lemahnya *corporate governance* adalah adanya tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian atas

investasi yang telah mereka tanamkan. Dengan demikian, secara agregat, hal tersebut akan mengakibatkan aliran masuk modal (*capital inflows*) ke suatu negara mengalami penurunan sedangkan aliran keluar modal (*capital outflows*) dari suatu negara mengalami kenaikan. Akibat selanjutnya adalah menurunnya harga-harga saham di negara tersebut, sehingga pasar modalnya menjadi tidak berkembang dan menurunnya nilai pertukaran mata uang negara tersebut.

Corporate governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Pelaksanaan *good corporate governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *corporate governance* menunjukkan adanya perlindungan tersebut.

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (YPPMI, 2002). Penerapan prinsip *corporate governance* tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan, termasuk investor. *Good corporate governance* itu sendiri memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhitungkan oleh kalangan bisnis. Dan aspek-aspek ini diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang menjadi momok dalam perusahaan. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.

Beberapa penelitian yang secara khusus menguji hubungan antara struktur *corporate governance* dengan pengungkapan informasi telah dilakukan oleh forker (1992), Ho dan Wong (2000), dan Sabeni (2002) dalam Khomsiyah (2003). Pentingnya penelitian mengenai *corporate governance* dan pengungkapan informasi dapat ditinjau dari dua perspektif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *corporate governance*, mengingat

pentingnya peran *corporate governance* dalam struktur pengelolaan bisnis dan ekonomi modern yang ditopang oleh pasar modal dan pasar uang (Withrell, 2000; Oman, 2001 dalam Khomsiyah, 2003), meningkatkan kepercayaan publik pada perusahaan (Brayshaw, 2002 dalam Khomsiyah, 2003). Penelitian yang dilakukan Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan *corporate governance* dengan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin tinggi indeks implementasi *corporate governance*, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul " Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Informasi ", dimana berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menganalisis hubungan antara *corporate governance* dengan pengungkapan informasi.

LANDASAN TEORI

Pengertian Good Corporate Governance

Secara umum *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Kata *governance* berasal dari bahasa Prancis *gubernance* yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *corporate governance*. Dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan (Sutojo dan Aldridge, 2008)

Istilah *corporate governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang dikenal sebagai *Cadbury Report*, laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *corporate governance* di seluruh dunia.

Komite Cadbury mendefinisikan *Corporate Governance* (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006) sebagai :

Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Organization for Economic Cooperation and Development (OCED) mendefinisikan *Corporate Governance* (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006) sebagai :

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur

perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan, dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006) adalah :

Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan etika.

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Price Waterhouse Coopers dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006) yang menyatakan bahwa *corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan – kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang yaitu, pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) sebuah organisasi profesional non-pemerintah yang bertujuan mensosialisasikan praktik *good corporate governance* menjabarkan prinsip – prinsip di atas sebagai berikut :

1. *Fairnes* (kewajaran)
2. *Disclosure and transparency* (transparansi)
3. *Accountability* (akuntabilitas)
4. *Responsibilities* (responsibilitas)
5. *Independency* (independensi)

2.3 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Gunarsih, 2003) Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif. GCG memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan. Berbagai analisis menunjukkan bahwa ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis *financial* dan krisis berkepanjangan di negara-negara Asia dengan lemahnya *corporate governance*.

Di samping hal-hal tersebut di atas GCG juga dapat :

- a. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
- d. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan .

Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

Faktor Penerapan *Good Corporate Governance*

Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Di sini, ada dua faktor yang memegang peranan, faktor *eksternal* dan *internal*.

1. Faktor *Eksternal*

Yang dimaksud faktor *eksternal* adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG.

Diantaranya :

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.

- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean government* menuju *good government governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practises*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG .

2. Faktor *Internal*

Maksud faktor *internal* adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamikan perusahaan dari waktu ke waktu .

2.5 Peranan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Menurut Egon Zehnder , Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan Dewan Komisaris

bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

2.6 Peranan Komite Audit

Telah diketahui secara umum bahwa untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (*governance*) oleh manajemen. Komite yang pada umumnya dibentuk adalah Komite Nominasi, dan Komite Audit. Berdasarkan praktik yang umum berlaku di dunia internasional disarankan bahwa anggota komite-komite tersebut diisi oleh anggota

Dalam *corporate governance* terdapat tiga komite yang memiliki peranan penting, yaitu :

- a. Komite Kompensasi / Remunerasi (*Compensation / Remuneration Committee*)
Membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasi / kompensasi untuk Dewan Direksi dan kebijakan-kebijakan kompensasinya lainnya, termasuk hubungan antara prestasi perusahaan dengan kompensasi bagi eksekutif perusahaan dalam hal ini CEO.
- b. Komite Nominasi (*Nomination / Governance Committee*)
Mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat yang akan dicalonkan, dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tentang struktur dewan dan proses nominasinya.
- c. Komite Audit (*Audit Committee*)
Memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen.

Salah satu dari komite-komite yang telah disebutkan di atas yaitu Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sebagai contoh, Komite Audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. *The Institute of Internal Auditors* (IIA) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki Komite Audit yang diatur sebagai komite tetap. IIA juga menganjurkan dibentuknya Komite Audit di dalam organisasi lainnya, termasuk lembaga-lembaga non-profit dan pemerintahan.

Pada umumnya, Komite Audit mempunyai tanggung jawab ;

1. Laporan keuangan (*Financial reporting*)
2. Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan

gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

3. Tata kelola perusahaan (*Corporate governance*)
4. Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
5. Pengawasan perusahaan (*Corporate control*)
6. Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006).

Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan.

Jumlah anggota Komite Audit disesuaikan besar kecilnya dengan organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal. Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan.

Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang *corporate governance* adalah sebagai berikut :

1. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan;
2. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta yang menyangkut masalah *corporate governance* dalam hal di mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya;
3. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan;

Peranan Dewan Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing

anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup empat tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, tanggung jawab sosial.

1. Kepengurusan

- a. Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- b. Direksi harus dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien;
- c. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan;
- d. Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi;
- e. Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.

2. Manajemen Risiko

- a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan;
- b. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dan adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko;
- c. Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, perusahaan perlu memiliki unit kerja atau penanggungjawab terhadap pengendalian risiko.

3. Pengendalian Internal

- a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian *internal* perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
- b. Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki satuan kerja pengawasan *internal*;
- c. Satuan kerja atau fungsi pengawasan *internal* bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha.
- d. Satuan kerja atau pemegang saham fungsi pengawasan *internal* bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan *internal*. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

4. Tanggung Jawab Sosial

- a. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan .

Pengertian Laporan Keuangan

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (*past performance*) serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Definisi laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan (2002), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Definisi laporan keuangan menurut peraturan Bapepam Nomor : VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dijelaskan bahwa laporan keuangan terdiri dari : Neraca yang menggambarkan posisi keuangan yang menunjukkan aktiva, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu; Laporan Rugi Laba yang merupakan ringkasan aktivitas usaha perusahaan untuk periode tertentu yang melaporkan hasil usaha bersih atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya; Laporan

Perubahan Ekuitas yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan; Laporan Arus Kas yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas perusahaan selama periode tertentu dengan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; Catatan Atas Laporan Keuangan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya .

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sementara itu tujuan laporan keuangan sebagaimana tertuang dalam surat edaran ketua Bapepam Nomor : SE-02/PM/2002 Tanggal : 27 Desember 2002 , adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna .

Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen (IAI,1999).

Pihak-Pihak Yang Memerlukan Laporan Keuangan

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Beberapa kebutuhan ini meliputi (IAI, 1999) :

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan Kreditor usaha lainnya.

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan pada tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan.

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama apabila mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung dengan perusahaan.

6. Pemerintah.

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Objektivitas laporan keuangan berfokus pada pemberian informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya dalam membuat keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif memberikan satu dasar pemilihan antara berbagai alternatif pelaporan dan akuntansi, seperti alternatif metode penjelasan. Karakteristik kualitatif juga membantu menjawab pertanyaan tentang karakteristik informasi akuntansi apa yang membuat informasi bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan .

Pengungkapan

Pihak pemakai memerlukan berbagai informasi yang relevan dan bermanfaat untuk keputusan investasi, kredit, dan semacamnya. Informasi keuangan yang dapat dilayani oleh pelaporan keuangan (*financial reporting*) hanya merupakan sebagian jenis informasi yang diperlukan oleh investor dan kreditor. FASB mengidentifikasi lingkup (*scope*) informasi yang dipandang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit sebagai berikut (Suwardjono, 2005)

1. Statement keuangan (*financial statement*)
2. Catatan atas statement keuangan (*notes to financial statement*)
3. Informasi pelengkap (*Supplementary information*)
4. Sarana pelaporan keuangan lain (*other means of financial reporting*)
5. Informasi lain (*other information*)

Komponen 1 dan 2 merupakan satu kesatuan yang disebut *basic financial statement* yang merupakan produk atau hasil dari apa yang oleh Paton dan Littleton (1970) dalam Suwardjono (2005) disebut kerangka atau struktur akuntansi pokok (*basic accounting structure*). Pelaporan keuangan mencakup semua informasi yang dapat disediakan manajemen yaitu komponen 1 sampai dengan 4. Walaupun dapat disediakan oleh manajemen, pengungkapannya tidak selalu dapat diwajibkan (*mandatory*) oleh penyusun standar akuntansi atau oleh badan pengawas (seperti SEC) melalui peraturan-peraturannya. Penyusun standar (FASB / IAI) dapat mewajibkan pengungkapan untuk komponen 1 sampai 3 dan untuk komponen 3 tingkat wajibnya hanya sampai pada batas sangat merekomendasi (*strongly recommend*). Jadi secara praktis, pengungkapan wajib melalui standar akuntansi hanya diberlakukan untuk komponen 1,2, dan dalam kondisi tertentu komponen 3 (Suwardjono, 2005).

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan yaitu memadai (*adequate disclosure*), wajar atau etis (*fair or ethical disclosure*), dan penuh (*full disclosure*). Tingkat ini mempunyai implikasi terhadap apa yang harus diungkapkan.

Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah. Tingkat wajar adalah tingkat yang harus

dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi. Tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan.

Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pengungkapan dalam lingkup 1 sampai 3 adalah pengungkapan wajib dan sisanya sebagai sukarela (Suwardjono,2005).

Tujuan Pengungkapan

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Suwardjono, 2005), diantaranya :

1. Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bawa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statement keuangan. Tujuan melindungi biasanya menjadi pertimbangan badan pengawasan yang mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal seperti SEC atau BAPEPAM.
2. Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusun standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.
3. Tujuan Kebutuhan Khusus, tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Hasil penelitian :

1. Korelasi Sederhana

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji hubungan penerapan *corporate governance* dengan pengungkapan informasi. Sesuai dengan hipotesis, implementasi *corporate governance* mempunyai hubungan dengan pengungkapan informasi. Ukuran perusahaan dan regulasi secara positif berhubungan dengan

indeks *corporate governance* dan pengungkapan informasi. Struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan keberadaan komite audit mempunyai hubungan yang signifikan dengan indeks *corporate governance* dan pengungkapan informasi. Namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya korelasi antara komposisi komisaris independen dan komite audit dengan indeks pengungkapan wajib.

2. Pengujian Hausman

Berdasarkan pengujian spesifikasi Hausman, penelitian ini secara signifikan menunjukkan adanya hubungan antara indeks *corporate governance* (CGPI) dengan nilai t sebesar 3.291 ($p=0.02$). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan simultan. Metode yang dapat memberikan hasil terbaik, konsisten dan efisien, adalah metode two-stage least square (2SLS).

3. Analisis regresi

Hasil pengujian terhadap persamaan 1 menunjukkan bahwa indeks pengungkapan mempunyai hubungan positif dengan indeks *corporate governance*. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi yang diberikan perusahaan dalam laporan tahunan, semakin tinggi tingkat implementasi *corporate governance* perusahaan.

Regresi variabel-variabel eksogen menunjukkan bahwa regulasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi *corporate governance*, hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan yang berada pada tingkat regulasi yang tinggi, yaitu perbankan, menerapkan *corporate governance* dengan lebih baik.

Hasil estimasi persamaan 2 juga mendukung hipotesis, menunjukkan bahwa indeks *corporate governance* mempunyai hubungan positif dengan indeks pengungkapan. Hal ini berarti semakin tinggi pula tingkat implementasi *corporate governance* semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan. Regresi variabel-variabel eksogen dalam persamaan 2 menunjukkan komposisi kepemilikan saham oleh masyarakat mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan.

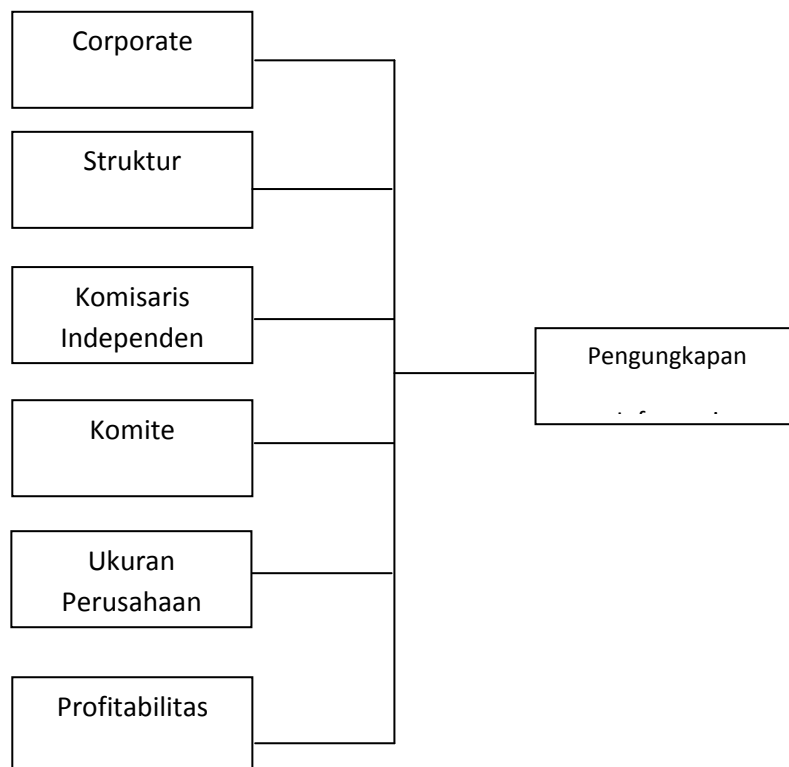
Variabel lainnya, yaitu komposisi komisaris independen, keberadaan komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berhasil memberikan bukti yang menyatakan adanya hubungan dengan indeks pengungkapan. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Sabeni (2002) dalam Khomsiyah (2003) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen mempunyai hubungan dengan luas pengungkapan. Namun penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Ho dan Wong (2002) dalam Khomsiyah (2003), yang berhasil memberikan bukti bahwa keberadaan komite audit mempunyai hubungan dengan luas bukti bahwa keberadaan audit mempunyai hubungan dengan luas pengungkapan.

Dari uraian di atas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Implementasi *corporate governance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

- H2 : Struktur kepemilikan masyarakat berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi.
- H3 : Keberadaan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi.
- H4 : Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi
- H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi.
- H6 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi.

Model Penelitian



Spesifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (independen variabel) dan variabel terikat (dependent variabel) (Khomsiyah, 2003).

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan informasi yang dilihat dari persentase indeks pengungkapan pada masing-masing perusahaan.

Indeks Pengungkapan disini merupakan butir laporan keuangan minimum yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang diatur secara rinci dalam SAK. Menghitung variabel independen dengan menggunakan rumus sebagai berikut ;

$$IP = n/k$$

Keterangan : IP : Indeks Pengungkapan

n: Jumlah butir pengungkapan yang dipenuhi

k: Jumlah semua butir pengungkapan yang mungkin dipenuhi.

2. Variabel Independen

Variabel Independen dalam persamaann ini meliputi ;

a. Indeks Corporate Governance

Indeks ini adalah hasil pemeringkatan atas penerapan *corporate governance* yang dilakukan oleh lembaga riset independen IICG.

b. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva dari neraca perusahaan.

c. Struktur Kepemilikan

Menekankan pada proporsi kepemilikan masyarakat sebagai pihak luar dari perusahaan. Merupakan suatu bentuk mekanisme corporate governance yang bisa menyamakan kepentingan pemilik, pengelola atau manajer perusahaan maupun pihak eksternal. Proporsi kepemilikan diwakili oleh variabel dummy, nilai 1 untuk kepemilikan masyarakat lebih dari 20% dan nilai 0 untuk kepemilikan masyarakat kurang dari 20%.

d. Dewan Komisaris

Menekankan pada komposisi keberadaan komisaris independen terhadap jumlah seluruh komisaris, artinya sukurang-kurangnya 20% anggota dewan komisaris haruslah merupakan orang-orang luar. Penelitian ini menggunakan variabel dummy yaitu bernilai 1 jika perusahaan memiliki susunan komisaris independen sesuai dengan peraturan BEI, dan 0 jika tidak memiliki susunan dewan komisaris independen.

e. Komite audit

Keberadaan komite audit merupakan salah satu kriteria penerapan GCG. Komite audit terdiri dari 3 sampai 5 orang anggota, diambil oleh dewan komisaris bukan dewan direksi agar obyektivitasnya terjaga. Menggunakan variabel dummy yaitu 1 jika perusahaan memiliki susunan komite audit sesuai dengan peraturan BEI dan 0 jika perusahaan tidak memiliki susunan komite audit independen sesuai dengan peraturan BEI.

f. Profitabilitas

Profitabilitas dihitung dengan menggunakan ROE

Analisis dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan *corporate governance* dengan pengungkapan informasi. Indeks *corporate governance* yang tinggi mungkin disebabkan adanya penerapan transparansi yang baik oleh perusahaan, atau pengungkapan informasi yang tinggi merupakan keputusan manajemen yang telah menerapkan *good corporate governance* (Khomsiyah, 2003)

Dalam penelitian ini juga akan menguji faktor baru yang mempengaruhi pengungkapan informasi, yaitu profitabilitas. Asumsi yang menjadi dasar adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan profit tinggi memiliki kecenderungan untuk mengupayakan pengungkapan informasi yang lebih baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengungkapan informasi yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya juga akan dipertimbangkan dalam pengujian penelitian ini (Khomsiyah, 2003), yaitu struktur kepemilikan (Susanto, 1992; Na'Im dan Rahman, 2000; dan Marwata, 2001); komposisi dewan komisaris (Forker, 1992; Ho dan Wong, 2000; Sabeni, 2002) Keberadaan komite audit (Forker, 1992; Ho dan Wong, 2000; Sabeni, 2002); ukuran perusahaan (Susanto, 1992; Lang dan Lundholm, 1993; Subiyantoro, 1997; Surtanto, 1999; Gunawan, 2000, dan Fitriany, 2001; dan Marwata, 2001) . Persamaannya adalah sebagai berikut :

$$IP = \alpha_0 + \alpha_1 ICG + \alpha_2 SK + \alpha_3 DK + \alpha_4 KA + \alpha_5 SIZE + \alpha_6 PRFT + \varepsilon_{2t}$$

Keterangan :

ICG : Indeks corporate governance

IP : Indeks Pengungkapan

SK : Struktur Kepemilikan

DK : Komposisi Dewan Komisaris

KA : Keberadaan Komite Audit

SIZE : Ukuran Perusahaan

PRFT : Profitabilitas

Berdasarkan persamaan di atas, maka peneliti menggunakan beberapa pengujian sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel independen dan dependen.

2. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan alat statistik regresi berganda mensyaratkan dilakukannya pengujian asumsi klasik. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi akan menyebabkan bias pada hasil penelitian. Asumsi klasik yang perlu diuji adalah normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan interpretasi Q-Q plot, untuk melihat apakah data variabel yang diuji berdistribusi normal dan layak untuk diuji statistik. Interpretasi terhadap Q-Q plot didasarkan pada garis lurus yang melintang dari pojok kiri bawah ke kanan atas sehingga membentuk arah diagonal sebagai garis acuan normalitas. Data yang diwakili dengan titik-titik akan tersebar di sekitar garis acuan normalitas apabila distribusi datanya memang normal.

b. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel bebas berhubungan secara linear. Uji multikolinearitas artinya ada hubungan kuat antara semua atau beberapa variabel penjelas dalam model regresi yang digunakan. Menurut Gujaranti dalam Theresia (2005), adanya multikolinearitas yang kuat akan mengakibatkan ketidaktepatan estimasi. Pengujian gejala multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel bebas berhubungan secara linear. Ada beberapa faktor indikator untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas yaitu:

1. Koefisien Determinan (R^2), tanda yang paling jelas dari multikolinearitas adalah ketika R^2 menjadi sangat tinggi tetapi tidak ada satupun atau sedikit sekali koefisien regresi parsial yang signifikan secara individu jika dilakukan uji t.
2. Koefisien Korelasi Parsial (r^2), gejala multikolinearitas mungkin dapat diketahui bila melihat R^2 yang tinggi namun koefisien korelasi parsialnya rendah. Pengujian gejala multikolinearitas dengan program SPSS dapat dilihat dari nilai tolerance value atau variance inflation factors. Regresi terdeteksi multikolinearitas apabila nilai VIF lebih besar dari 5 (Singgih Santoso, 2000).

c. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas model regresi adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya).

3. Analisis Regresi

Analisis regresi yaitu regresi variabel-variabel eksogen pada persamaan, untuk melihat pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap Pengungkapan Informasi.

3.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan *corporate governance* (yang dilihat dari indeks *corporate governance*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi.

Pengujian secara parsial dipergunakan untuk mengetahui apakah koefisien regresi variabel independen (x) hasil estimasi secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (y).

Langkah Pengujian :

1. Merumuskan Hipotesis Statistik

$H_{a1}: \beta = 0$; variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

$H_{a2}: \beta \neq 0$; variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Menetapkan level of significant sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan degree of freedom (df) = n-k-1 untuk mengetahui nilai t tabel pada daerah penerimaan dan penolakan H_0 .
3. Perhitungan nilai t dengan program SPSS.

Tabel 4.1 Keterangan Jumlah Perusahaan yang Dijadikan Sampel

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Perusahaan yang di observasi	50	Pemeringkatan IICG
2	Sampel Gugur	3	Merger

		1	Data Tidak Lengkap
3	Perusahaan Sampel	46	

Sumber : Pengolahan Data Tahun 2012

Penelitian dilakukan terhadap sampel yang terdiri dari 50 perusahaan yang berpartisipasi dalam CGPI berdasarkan peringkat tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yang disajikan dalam lampiran. Sedangkan jumlah perusahaan yang memenuhi dalam penelitian ini berjumlah 46 perusahaan. Roda Vivatex Tbk melakukan merger dengan Sunson Textile Manufacture Tbk. pada bulan Maret 2007, sedangkan

Indorama Syntetics Tbk telah melakukan merger dengan Ever Shine Textile Industry Tbk , Juli 2008. Budi Acid Jaya Tbk telah melakukan marger dengan Lautan Luas Tbk pada Oktober 2008, sehingga pada tahun yang bersangkutan kedua perusahaan tersebut tidak mengeluarkan laporan keuangan. Juga terdapat 1 perusahaan yang dikeluarkan dari sampel dikarenakan data tidak lengkap. Menurut Sekaran (1992) jumlah atau ukuran sampel 30-50 sudah cukup layak dan efektif untuk penelitian. Karena mempertimbangkan tujuan, efektifitas, biaya dan waktu metode *purposive sampling* diharapkan cukup valid dan akurat. Sebelumnya data dianalisis dilakukan uji asumsi klasik. Data menggunakan signifikansi 5% dengan tingkat keyakinan 95%.

Statistik Deskripsi

Tabel 4.2

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Nilai Minimum	Nilai Maximum
CGPI	46	80.5890	5.06883	68,56	90,46
P_I	46	.83666	.062389	0,73	0,94
ROE	46	.231589	1607085	0,2357	0,6188
S_K	46	.68	.471	0,141	0,547
D_K	46	.82	.385	0,64	0,82
K_A	46	.81	.398	0,2571	0,6631
U_P	46	3.25E13	5.801E13	51880362332	26751719200000 0

--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4.2 menyajikan statistik deskriptif *dependent variable* dan *independent variable*. Berdasarkan 46 perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata indeks *corporate governance* sebesar 80,58 dengan nilai maksimum sebesar 90,46 dan nilai minimum sebesar 68,56. Rata-rata indeks pengungkapan sebesar 0,83 dengan nilai maksimum sebesar 94% dan nilai minimum sebesar 73%. Rata-rata total aktiva sebagai proksi ukuran perusahaan menunjukkan nilai sebesar 34.736.378.067.017,33, dengan nilai maksimum sebesar 267.517.192.000.000 dan nilai minimum sebesar 518.803.623.322. Sedangkan rata-rata ROE sebagai proksi profitabilitas menunjukkan nilai sebesar 0,231589 dengan nilai maksimum sebesar 0,6188 dan nilai minimum sebesar 0,2357.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Pada gambar 4.1 dapat dilihat interpretasi hasil uji normalitas dengan menggunakan *Q-Q Plot*, Interpretasi yang dilakukan terhadap gambar normal *Q-Q Plot* untuk variabel dependen pengungkapan informasi, memperlihatkan bahwa data yang diwakili dengan titik-titik tersebar di sekitar garis acuan normalitas. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan normal *Q-Q Plot*, terbukti bahwa data variabel dependen pengungkapan informasi berdistribusi normal.

Tabel 4.1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
	N	46
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.41843558
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.158
	Positive	.158
	Negative	-.113

Kolmogorov-Smirnov Z	1.049
Asymp. Sig. (2-tailed)	.221

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik tidak ada korelasi antara variabel bebas (Santoso, 2000). Uji ini dilihat dari nilai VIF nilai yang umumnya dipakai untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Regresi terdeteksi multikolinearitas apabila nilai $VIF > 5$.

Tabel 4.3

Uji Multikolinearitas

No.	Variabel	Tolerance	VIF
1.	Corporate Governance	0,812	1,231
2.	Struktur Kepemilikan	0,592	1,689
3.	Dewan Komisaris	0,723	1,383
4.	Komite Audit	0,487	2,055
5.	Ukuran Perusahaan	0,683	1,463
6.	Profitabilitas	0,653	1,532

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel independen lebih dari 1 kurang dari 5 ($1 < VIF < 5$), maka dapat disimpulkan tidak

terdapat multikolinearitas antara variabel independen. Jadi asumsi klasik tidak terdeteksi multikolinearitas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Tampak pada gambar 4.2 diagram pencar residual tidak membentuk pola tertentu. Dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tidak terdeteksi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di setiap model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya ($t-1$). Uji ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW) yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi

DW	DU	6-DU	Keterangan
2.141	1.720	2.280	Signifikan pada α 0,05

Adapun nilai dU untuk 5 buah variabel dengan 46 data pada taraf 5% adalah sebesar 1,720 maka, 6-dU sebesar 2,280. Dikatakan tidak terdapat autokorelasi bila $dU < DW < 4-dU$, dan hasil uji Durbin-Watson adalah 2,141 berada diantara 1,720 dan 2,280. Penelitian ini dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi. Data yang tidak terdapat autokorelasi berarti memiliki perilaku yang random atau acak.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap pengungkapan informasi. Selain itu penelitian ini juga menguji kembali variabel yang terdapat dalam penelitian sebelumnya, yaitu struktur kepemilikan, keberadaan dewan komisaris independen, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas

Analisis pengaruh struktur kepemilikan, dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan informasi.

Tabel Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of Estimate
1	,809(a)	,654	,590		0,39824

Dari tabel model summary diatas terlihat bahwa nilai R-Square secara keseluruhan untuk tahun 2007-2011 menggambarkan bahwa *corporate governance*, struktur kepemilikan, dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas mempengaruhi pengungkapan informasi sebesar 0,654 atau 65,4% sedangkan sisanya 5,90% dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Uji Kelayakan

Anova (Analysis of Variance)

Model	Sum of square	df	Mean square	F	Sig
1 Regression	,114	7	,016	10,260	,000 ^a
Residual	,060	38	,002		
Total	,174	45			

a.Predictors : (Constan), PRFT,ICG,SK,SIZE,DK,KA

b.Dependent Variable :IP

Dari tabel anova diatas berdasarkan uji kelayakan model (uji F) terlihat bahwa pada kolom sig atau signifikan secara keseluruhan untuk tahun 2007 sampai tahun 2011 adalah 0,000 dan nilai F hitung 10,260 > 1,684 F tabel sehingga profitabilitas, implementasi *corporate governance*, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan komite audit secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengungkapan informasi.

Pengaruh dan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Besarnya nilai yang dihasilkan oleh profitabilitas, implementasi *corporate governance*, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan komite audit dalam mempengaruhi pengungkapan informasi dapat dilihat pada tabel hasil estimasi dibawah ini.

Tabel 4.4

Regresi

No.	Variabel	t-statistik	PI	Keterangan

1.	Indeks Corporate Governance	2,147	0,038	Signifikan
2.	Struktur Kepemilikan	1,140	0,036	Signifikan
3.	Dewan Komisaris	1,075	0,028	Signifikan
4.	Komite Audit	1,106	0,016	Signifikan
5.	Ukuran Perusahaan	1,219	0,030	Signifikan
6.	Profitabilitas	0,463	0,046	Signifikan

Tabel 4.4 menunjukkan pengaruh independent variable terhadap dependent variable.

- a. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi sebesar 2.147 dengan *p-value* sebesar 0.038, karena *p-value* lebih kecil dari α 5% ($0.038 < 0.05$), ini berarti *corporate governance* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi. Hasil pengujian terhadap variabel dependen pengungkapan informasi dalam persamaan menunjukkan bahwa implementasi *corporate governance* mempengaruhi pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan.
- b. Dalam tabel 4.4 dapat dilihat bahwa struktur kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi. Dapat dilihat nilai t-statistik sebesar 1.140 dan *p-value* sebesar 0.036, karena *p-value* lebih kecil dari α 5% ($0.036 < 0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi.
- c. *Independent variable* lainnya, yaitu komposisi komisaris independen berhasil memberikan bukti yang menyatakan adanya pengaruh terhadap pengungkapan informasi. Komisaris independen memberikan pengaruh sebesar 1.075 dengan *p-value* sebesar 0.028, maka dapat disimpulkan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dikarenakan dalam hasil penelitian *p-value* lebih kecil dari α 5% ($0.028 < 0.05$).
- d. Komite audit berhasil memberikan bukti yang menyatakan adanya pengaruh terhadap pengungkapan informasi. Komite Audit memberikan pengaruh sebesar 1.106 dengan *p-value* sebesar 0.016, maka dapat disimpulkan komite

audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dikarenakan nilai *p-value* lebih kecil dari α 5% ($0.016 < 0.05$).

- e. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dengan *p-value* sebesar 0.030, karena *p-value* lebih kecil dari α 5% ($0.030 < 0.05$), ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi.
- f. Dalam tabel 4.4 dapat dilihat bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi. Dapat dilihat nilai t-statistik sebesar 0.463 dan *p-value* sebesar 0.046, karena *p-value* lebih kecil dari α 5% ($0.046 < 0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa profitabilita berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rasio pemberian informasi oleh suatu perusahaan. Analisis faktor-faktor merupakan teknik analisis yang menganggap bahwa pemberian informasi secara transparan merupakan refleksi dari nilai perusahaan yang bersangkutan, oleh karena itu, dalam melakukan analisis faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya informasi keuangan harus menjadi perhatian lebih, mengingat ada beberapa pihak yang menginginkan laporan keuangan secara terbuka, dan transparan.

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan diperoleh yaitu:

- a. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dengan *p-value* sebesar 0.038, *p-value* lebih kecil dari α 5% ($0.038 < 0.05$). Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan semakin tinggi implementasi *corporate governance*, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan (Khomsiyah, 2003).
- b. Analisis regresi menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi. Dapat dilihat dari nilai t-statistik sebesar 1.140 dan *p-value* sebesar 0.036, *p-value* lebih kecil dari α 5% ($0.036 < 0.05$).
- c. Komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dikarenakan dalam hasil penelitian *p-value* lebih kecil dari α 5% ($0.028 < 0.05$). Dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa tidak ada keharusan bagi perusahaan terdaftar untuk mengungkapkan tentang kondisi dan struktur *corporate governance* khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris.
- d. Komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dikarenakan nilai *p-value* lebih kecil dari α 5 % ($0.016 < 0.05$).

- e. Analisis regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dengan p-value sebesar 0.030, p-value kecil besar dari α 5% ($0.030 < 0.05$).

Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi investor dan calon investor

Investor dan calon investor agar memperhatikan gambaran tentang pemberian informasi dengan memperhatikan informasi akurat yang berhubungan dengan nilai perusahaan serta melakukan analisis terhadap informasi yang diberikan perusahaan. Salah satunya adalah analisis dengan *corporate governance* baik struktur kepemilikan, dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan yang baik akan mengurangi resiko kerugian dari penanaman modal yang tidak jelas pemberian informasinya.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan perluasaan tahun pengamatan dan penambahan variabel-variabel penelitian lainnya seperti *good corporate governance*, dan unsur lainnya yang digunakan dalam penelitian agar diperoleh hasil yang lebih akurat lagi, dan objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini,R.r."Pengungkapan Informasi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Laporan Keuangan Tahunan (Study Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)". Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.

Buku Format Penulisan Karya Ilmiah Unila, edisi revisi ketiga. Unila. 2007. Bandar Lampung. 60 Halaman

Khomsiyah.2003."Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi : Pengujian Secara Simultan". Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.

Kusumawati,D.N."Profitability and Corporate Governance Disclosure : An Indonesian Study". Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.

Surya, Indra dan Ivan Yustiaavanda.2006. Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Zarkasyi, Wahyudin.2008. Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, Bandung : CV. Suwardjono (2001). Teori Akuntansi. BPFE. Yogyakarta

Wati, Eva Lina. 2007. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Jumlah Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Yang Go Public Di Bursa Efek Jakarta. Skripsi. Universitas Lampung.

Harahap, Sofyan Syafri. 1993. Teori Akuntansi. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Theresia, D. "Hubungan Antara *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang *Listing* di Bursa Efek Jakarta)". *Kumpulan Artikel SNA VIII Solo*. September. Hal. 238-247.

Tjager, Nyoman, dkk. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo

2006. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

